



PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KAMPUS MERDEKA - SMART VILLAGE

EDISI MAHASISWA



LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH III
TAHUN 2024

PANDUAN

**PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KAMPUS MERDEKA
SMART VILLAGE**

Edisi Mahasiswa

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

PENGARAH

Toni Toharudin

PENANGGUNG JAWAB

Tri Munanto

Adhy Purnama

TIM PENYUSUN

Erna Ermawati Chotim

DESAIN DAN TATA LETAK

Tim Belmawa dan Prestasi

Universitas Nasional

PENERBIT

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan
Kebudayaan, Riset dan Teknologi

SEKRETARIAT

Jl. SMA Negeri 14, Cawang, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Panduan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Kampus Merdeka – *Smart Village*, yang dirancang khusus untuk mendukung Program PKM *Smart Village*. Buku ini hadir sebagai panduan yang komprehensif bagi para dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan salah satu dari tiga pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Program *Smart Village* dikembangkan untuk menjawab tantangan pembangunan desa di era modern melalui pendekatan yang cerdas dan terintegrasi. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari mobilitas, tata kelola, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan, yang semuanya dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa dengan pengetahuan dan teknologi yang relevan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, kolaborasi antara perguruan tinggi lintas bidang menjadi sangat penting. Perguruan tinggi diharapkan dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada, serta menciptakan sinergi yang produktif antar institusi pendidikan.

Buku panduan ini memberikan arahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta mempertimbangkan kinerja berdasarkan klasterisasi. Kami berharap buku ini dapat menjadi acuan yang berguna bagi seluruh pihak yang terlibat, sehingga program pengabdian yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik melalui ide, saran, maupun tenaga. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para dosen dan praktisi pengabdian kepada masyarakat, dan menjadi inspirasi dalam setiap upaya untuk menciptakan desa yang cerdas dan mandiri di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Agustus 2024

Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1. 1. <i>Latar Belakang</i>	6
1. 2. <i>Tujuan PkM Merdeka Desa Cerdas (Smart Village)</i>	10
1. 3. <i>Dasar Hukum</i>	11
1. 4. <i>Ruang Lingkup</i>	12
1. 5. <i>Pengertian</i>	13
BAB II KETENTUAN UMUM PKM SMART VILLAGE	16
2. 1. <i>Desain Konsep 6 (Enam) Pilar Smart Village</i>	16
2. 2. <i>Penerapan 6 Pilar Smart Village dan Upaya Pencapaian SDG's Desa</i>	18
2. 3. <i>Prinsip Pelaksanaan PKM Smart Village</i>	20
2. 4. <i>Sasaran</i>	21
2. 5. <i>Kompetensi yang dibutuhkan Mahasiswa PKM</i>	25
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	27
3. 1. <i>Lokasi dan Peserta Kegiatan</i>	27
3.6. <i>Kewajiban Mahasiswa</i>	29
3.7. <i>Satuan Kredit Semester (SKS) dan Waktu Pelaksanaan</i>	29
3.8. <i>Target Luaran</i>	30
<i>Peran L2Dikti 3 dalam Pendanaan</i>	31
<i>Monitoring dan Evaluasi Internal</i>	31
3.10. Pelaporan dan Transparansi	31
<i>Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana bagi kepentingan internal perguruan tinggi, setiap PT diharapkan untuk:</i>	31

BAB IV PENGELOLAAN KEGIATAN PKM	33
4. 1. <i>Alur Kegiatan dan Struktur Organisasi PKM.....</i>	<i>33</i>
<i>Deskripsi Tugas Peserta PKM.....</i>	<i>40</i>
BAB VI.....	41
EVALUASI DAN SANKSI	41
6. 1. <i>Prosedur Monitoring dan Evaluasi.....</i>	<i>41</i>
6. 2. <i>Penyerahan Laporan PKM</i>	<i>42</i>
6. 3. <i>Evaluasi Kegiatan PKM.....</i>	<i>42</i>
6. 4. <i>Sanksi.....</i>	<i>43</i>
6. 5. <i>Ketentuan Khusus.....</i>	<i>44</i>
LAMPIRAN	45
<i>Lampiran 1. Format Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat.....</i>	<i>45</i>
<i>Lampiran 2. Format Cover</i>	<i>47</i>
<i>Lampiran 3. Format Lembar Pengesahan Laporan PkM</i>	<i>48</i>
<i>Lampiran 4. Format Luaran Video Kegiatan PKM.....</i>	<i>49</i>
<i>Lampiran 6. Format Artikel Ilmiah</i>	<i>50</i>
<i>Lampiran 7. Format Log Book Kegiatan PKM.....</i>	<i>51</i>
<i>Lampiran 8. Format Indikator Monitoring DPL.....</i>	<i>52</i>
<i>Lampiran 10. Form Rekognisi dan Konversi</i>	<i>53</i>
<i>Lampiran 11. Form Rekognisi dan Konversi</i>	<i>56</i>

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan elemen krusial dalam Tridharma Perguruan Tinggi, bersanding dengan Pendidikan dan Penelitian. Perannya sangat penting dalam menghubungkan dunia akademis dengan realitas sosial. Bagi civitas akademika, PkM bukan sekadar tugas wajib, melainkan peluang berharga untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan dalam konteks nyata, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Signifikansi PkM tercermin dalam berbagai aspek. Pertama, sebagai wadah implementasi ilmu, PkM memungkinkan para akademisi menerapkan teori dan hasil penelitiannya pada situasi riil, memperdalam pemahaman tentang aplikasi praktis dari bidang yang ditekuni. Kedua, PkM menjadi arena pengembangan *soft skills*, dimana civitas akademika termasuk mahasiswa dapat mengasah kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Lebih jauh, PkM membuka jalan bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman di lapangan juga memberikan umpan balik berharga untuk pengembangan kurikulum dan arah penelitian. Tak kalah pentingnya, PkM menjadi sarana membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak di luar kampus.

Berdasarkan regulasi terkini dari Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti), PkM telah ditetapkan sebagai bagian dari kewajiban setiap perguruan tinggi, menegaskan posisinya sebagai bagian integral dari Tridharma. Regulasi ini menekankan pentingnya integrasi PkM ke dalam kurikulum dan kegiatan akademik, termasuk dalam penilaian kinerja dosen dan mahasiswa. Dikti juga telah menetapkan standar mutu untuk pelaksanaan PkM, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Perguruan tinggi diwajibkan mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan PkM, baik dari sumber internal maupun kerjasama eksternal. Hasil PkM harus didokumentasikan dan dipublikasikan untuk memperluas dampak dan manfaatnya.

Kerjasama multisektor dalam PkM sangat didorong, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Program PkM diharapkan memiliki dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Kontribusi dalam PkM juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian kinerja dan promosi akademik.

Dengan landasan regulasi ini, PkM telah bertransformasi dari sekadar kegiatan sampingan menjadi komponen integral dari fungsi dan tanggung jawab perguruan tinggi dalam memajukan masyarakat dan bangsa. Karenanya, pelaksanaan PkM mengandung lima aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan lainnya, yaitu: (1) keterpaduan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; (2) pendekatan interdisipliner dan komprehensif; (3) lintas sektoral; (4) dimensi yang luas dan kemanfaatan, serta (5) keterlibatan masyarakat secara aktif.

Mengapa PkM Merdeka Desa Cerdas (*Smart Village*)

Pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada pengembangan desa telah menjadi agenda krusial dalam strategi pembangunan nasional Indonesia. Desa, sebagai entitas terkecil dalam struktur pemerintahan, memainkan peran vital dalam pembangunan sosial-ekonomi negara. Meskipun demikian, banyak desa masih menghadapi beragam tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga akses pendidikan dan kesehatan yang belum optimal. Oleh karena itu, PkM yang berfokus pada desa menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020).

Di era digital saat ini, desa-desa di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi dan memanfaatkan potensi ekonomi digital. Meski sinyal ponsel telah menjangkau 92% desa dan sinyal internet telah mencapai 84% desa, masih terdapat kesenjangan dalam literasi informasi dan pemanfaatan teknologi digital di wilayah pedesaan.

Potensi ekonomi digital yang diproyeksikan akan menyumbang 9,5% (USD 155 miliar) terhadap PDB pada tahun 2025 menjadikan konsep *smart village* semakin menarik bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Namun, beberapa masalah masih menghambat perkembangan ini. Kurangnya informasi dan kolaborasi antara desa dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam jaringan pasar digital menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, belum tersedianya data dan pemetaan aset desa secara utuh juga menghambat pengembangan potensi desa.

UU Desa Nomor 6 dan adanya dana desa sebenarnya memberikan peluang untuk pengembangan *smart village*. Namun, kurangnya dorongan ide kreatif dan inovasi



masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi desa, serta keterbatasan aplikasi di desa, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Dengan memahami latar belakang ini, program PkM *Smart Village* menjadi bentuk inovasi sosial strategis untuk menciptakan ekosistem yang mendukung munculnya solusi mengatasi permasalahan desa berbasis teknologi. Desa cerdas diharapkan dapat menjembatani kesenjangan digital, meningkatkan literasi informasi, dan memberdayakan masyarakat desa dalam memanfaatkan teknologi untuk pengembangan ekonomi lokal. Melalui kolaborasi yang terarah dan pemanfaatan dana desa yang efektif, diharapkan konsep smart village dapat diimplementasikan secara optimal, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di era ekonomi digital.

Fasilitasi terbentuknya "desa cerdas" atau "smart village" sekaligus sebagai pendekatan strategis. Melalui konsep desa cerdas diharapkan dapat diintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam berbagai aspek kehidupan desa, dari tata kelola pemerintahan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ramli et al. (2022) menyoroti bahwa desa cerdas dapat meningkatkan efisiensi tata kelola melalui penerapan e-governance, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan desa.

Akselerasi pembangunan ekonomi menjadi salah satu dampak signifikan dari implementasi desa cerdas. Melalui pemanfaatan teknologi digital, desa cerdas membuka peluang baru dalam pengembangan UMKM, e-commerce, dan agribisnis berbasis teknologi (Pramanik et al., 2021). Selain itu, integrasi TIK dalam layanan publik dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi desa (Suhono et al., 2023). Desa cerdas juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan mendorong literasi digital dan membuka akses terhadap informasi dan pengetahuan yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan temuan Nurfadilah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital di desa dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Aspek pelestarian lingkungan tidak luput dari manfaat desa cerdas. Penerapan teknologi *smart farming* dan manajemen sumber daya alam berbasis digital dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Syahril et al., 2021). Lebih lanjut, desa cerdas mempersiapkan masyarakat desa untuk bersaing di era digital, mengurangi kesenjangan digital antara desa dan kota.



Desa cerdas juga berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial melalui sistem informasi terpadu sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan krisis. Dalam aspek budaya, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan dan mempromosikan kearifan lokal serta budaya desa (Hidayat et al., 2023).

Terakhir, desa cerdas memudahkan sinkronisasi program pembangunan desa dengan agenda pembangunan nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Dengan memfasilitasi terbentuknya desa cerdas, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi untuk pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya saing di era digital. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Karenanya, fokus PkM pada pengembangan desa cerdas merupakan investasi strategis dalam membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa sebagai basis kekuatan ekonomi dan sosial bangsa, serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengapa LLDikti Wilayah 3 hadir?

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah 3 memainkan peran krusial dalam memfasilitasi program PkM yang berfokus pada pengembangan desa cerdas. Signifikansi kehadiran LLDikti Wilayah 3 dalam konteks ini tidak dapat diabaikan, mengingat beberapa faktor penting yang mendukungnya. LLDikti Wilayah 3 menempati posisi strategis sebagai jembatan penghubung antara dunia akademik dan masyarakat luas. Dengan cakupan wilayah yang ekstensif, lembaga ini mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai inisiatif PKM dari beragam perguruan tinggi. Hasil yang diharapkan adalah dampak yang lebih masif dan terukur dalam upaya pengembangan desa cerdas, sebagaimana digarispawahi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022)

Lebih lanjut, LLDikti Wilayah 3 memiliki kapabilitas untuk memobilisasi sumber daya akademik yang substansial. Melalui jaringan perguruan tinggi yang luas, lembaga ini dapat mengoptimalkan keberadaan tenaga ahli, peneliti, dan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam program-program PkM Merdeka Desa Cerdas. Hal ini memungkinkan penyediaan ahli (*expertise*) yang diperlukan dalam berbagai aspek pengembangan desa secara kolaboratif dan integratif.

LLDikti Wilayah 3 juga dapat berperan sebagai katalis inovasi dalam konteks pengembangan desa cerdas. Melalui fasilitasi PkM, lembaga ini mampu menstimulasi lahirnya solusi-solusi inovatif yang merupakan hasil kolaborasi antara akademisi lintas universitas dan masyarakat desa. Tentunya solusi-solusi yang dihasilkan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi local (kontekstual).

1. 2. Tujuan PkM Merdeka Desa Cerdas (Smart Village)

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Desa Cerdas merupakan inisiatif strategis yang berusaha menggabungkan keahlian akademik dengan kebutuhan pembangunan pedesaan di era digital. Secara umum program ini didorong untuk mentransformasi desa-desa di Indonesia menjadi entitas yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara tepat guna.

Tujuan Umum

Buku Panduan Kegiatan ini bertujuan memberikan acuan yang komprehensif bagi mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Panduan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan PkM yang dilakukan tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga berdampak signifikan, positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selanjutnya, tujuan umum dari pedoman ini adalah untuk mendorong kolaborasi antar perguruan tinggi dalam berbagai klaster dan bidang, sehingga dapat tercipta sinergi yang kuat antara institusi berpengalaman dan institusi pemula. Melalui pendekatan ini, diharapkan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dapat terjadi secara lebih efektif, mempercepat pembangunan desa cerdas yang berfokus pada mobilitas, tata kelola, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, pedoman ini tidak hanya membantu dalam mencapai standar PkM yang telah ditetapkan, tetapi juga berperan dalam memperkuat posisi perguruan tinggi dalam peta kinerja nasional, melalui peningkatan mutu penelitian dan pengabdian yang berbasis pada kolaborasi dan inovasi lintas kluster, lintas universitas, dan lintas disiplin

Tujuan Khusus

1. Memberikan acuan yang jelas dan terstruktur bagi mahasiswa khususnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan PkM, dengan fokus pada sinergi antara teori dan praktik lapangan.
2. Mensinergikan kegiatan PkM di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam program PkM Merdeka Desa Cerdas, agar selaras dengan regulasi, kebijakan nasional, dan program pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan strategis klasterisasi perguruan tinggi.
3. Memberikan arahan agar PkM mampu menjawab tantangan dan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di berbagai bidang, serta mendorong inovasi yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
4. Memberikan petunjuk dalam membangun jejaring kerjasama lintas perguruan tinggi, terutama melalui kolaborasi antar klaster, untuk memperkuat kapasitas dan dampak PkM
5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan *networking* dan *resource sharing*, serta memaksimalkan potensi teknologi dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi untuk diterapkan di masyarakat.
6. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat umum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Memberikan panduan umum kepada perguruan tinggi maupun mahasiswa tentang mekanisme konversi kegiatan PkM dengan mata kuliah yang berjalan.
8. Memberikan panduan bagaimana kegiatan PkM Smart Village dapat memenuhi CPL dari mata kuliah dan kompetensi bagi mahasiswa.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301)
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara RI Tahun 2012 Nomor 158);

4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesian).
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi
9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi tahun 2024 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

1. 4. Ruang Lingkup

Lingkup bahasan dalam pedoman ini mencakup:

1. **Pendahuluan:** Bagian ini menguraikan latar belakang, tujuan pedoman, dasar hukum, ruang lingkup, peran dari L2Dikti Wilayah 3, dan pengertian-pengertian yang relevan. Termasuk keberadaan konsep Smart Village dengan klusterisasi perguruan tinggi untuk memperkuat kinerja pengabdian kepada masyarakat.
2. **Standar dan Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat.** Bagian ini mencakup definisi, tujuan, standar, dan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah standar untuk pelaksanaan program-program seperti PKM Smart Village yang berfokus pada inovasi dan pemberdayaan teknologi dalam berbagai sektor seperti pertanian, tata kelola, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup, sesuai dengan hasil klusterisasi perguruan tinggi.
3. **Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.** Bagian ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah indikator keberhasilan, sumber dana, dan publikasi. Pengelolaan ini harus mempertimbangkan kolaborasi lintas klaster untuk memaksimalkan potensi dan

dampak pengabdian, serta integrasi dengan program-program pembangunan lokal dan nasional.

4. **Penjaminan Mutu untuk kegiatan PkM Mahasiswa.** Bagian ini memuat bagaimana standar penjaminan mutu bagi kegiatan PkM Mahasiswa
5. **Pelaporan,** Bagian ini menjelaskan prosedur pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dengan fokus pada luaran berupa laporan, jurnal ilmiah dan video kegiatan. Pedoman ini juga mencakup contoh template penulisan yang disesuaikan dengan standar publikasi ilmiah dan kebutuhan dokumentasi.
6. **Dokumen pendukung PkM Mahasiswa.** Bagian ini berisi templete isian umum yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan PkM dengan standar dan kebutuhan konversi mata kuliah

1. 5. Pengertian

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan buku pedoman PkM Smart Village untuk mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. **Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)** adalah bagian dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan dalam bentuk serangkaian kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam bentuk aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh LLDIKTI Wilayah III dengan mengkoordinir berbagai universitas atau institut yang ada di lingkungan wilayah L2Dikti Wilayah 3 untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh civitas akademika perguruan tinggi dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PKM merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia.
2. **Mahasiswa** adalah individu yang berstatus aktif sebagai mahasiswa pada satu perguruan tinggi tertentu yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan sarjana yang telah menyelesaikan minimal 4 semester (untuk program Sarjana) dan berasal dari berbagai program studi sehingga dianggap cukup untuk berkontribusi dalam kegiatan PkM dan mendapatkan persetujuan akademik dari

program studi atau perguruan tingginya masing-masing untuk mengikuti kegiatan PkM Smart Village.

3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
4. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. **Smart Village** adalah program inisiatif yang bertujuan untuk mengembangkan desa cerdas melalui penerapan teknologi dan inovasi di berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, tata kelola, ekonomi, dan lingkungan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemandirian desa dan memberdayakan masyarakat setempat, serta melibatkan kolaborasi lintas perguruan tinggi dalam pelaksanaannya.
6. **Klasterisasi Perguruan Tinggi** adalah pengelompokan perguruan tinggi berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Klasterisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi melalui kolaborasi dan sinergi antar institusi yang berada dalam klaster yang sama maupun lintas klaster. Hal ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang lebih terarah dan terukur.
7. **Kolaborasi Lintas Klaster:** Kerjasama antara perguruan tinggi dari klaster-klaster yang berbeda dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan sumber daya, serta memperkuat hasil dan dampak dari program-program pengabdian yang dilaksanakan, seperti dalam implementasi *Smart Village*.
8. **Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat:** Ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan dampak dari kegiatan



pengabdian kepada masyarakat. Indikator ini dapat mencakup aspek kuantitatif seperti jumlah publikasi, jumlah masyarakat yang terlibat, serta aspek kualitatif seperti tingkat perubahan sosial atau ekonomi yang dihasilkan dari program tersebut



BAB II KETENTUAN UMUM PKM SMART VILLAGE

2. 1. Desain Konsep 6 (Enam) Pilar Smart Village

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Smart Village merupakan inisiatif komprehensif yang bertujuan untuk mentransformasi kehidupan desa melalui pendekatan holistik berbasis teknologi dan inovasi. Program ini dibangun di atas enam pilar utama yang saling terkait dan mendukung satu sama lain:

1. **Smart People:** Pilar ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di desa. Melalui pelatihan digital, program literasi informasi, dan pengembangan keterampilan, masyarakat desa dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi era digital. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adaptif, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
2. **Smart Living:** Fokus pilar ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pengembangan sistem kesehatan berbasis teknologi, rumah pintar yang hemat energi, dan sistem keamanan terpadu. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, aman, dan efisien bagi penduduk desa.
3. **Smart Environment:** Pilar ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan desa melalui penerapan teknologi ramah lingkungan. Ini meliputi sistem pengelolaan sampah terpadu, energi terbarukan, dan monitoring lingkungan berbasis sensor. Fokusnya adalah menciptakan desa yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.
4. **Smart Governance:** Pilar ini berfokus pada peningkatan tata kelola desa melalui digitalisasi layanan publik. Ini mencakup pengembangan sistem e-government desa, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan desa yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
5. **Smart Mobility:** Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di desa. Ini meliputi pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan teknologi, sistem informasi transportasi real-time, dan solusi mobilitas berbagi. Fokusnya adalah memudahkan pergerakan orang dan barang, baik di dalam desa maupun koneksi dengan daerah lain.

6. **Smart Economy:** Pilar terakhir ini berfokus pada pengembangan ekonomi desa berbasis digital. Ini mencakup pemberdayaan UMKM lokal melalui e-commerce, pengembangan desa wisata digital, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing di era digital.

Melalui implementasi keenam pilar ini secara terintegrasi, PkM Smart Village diharapkan dapat menciptakan ekosistem desa yang cerdas, berkelanjutan, dan sejahtera. Program ini tidak hanya fokus pada penerapan teknologi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam transformasi desa mereka. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat berkembang menjadi Smart Village yang mampu mengoptimalkan potensi lokal dan bersaing di era ekonomi digital. Secara ringkas pilar yang mendasari PkM Smart Village dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Desain Konsep 6 Pilar Smart Village

2. 2. Penerapan 6 Pilar Smart Village dan Upaya Pencapaian SDG's Desa

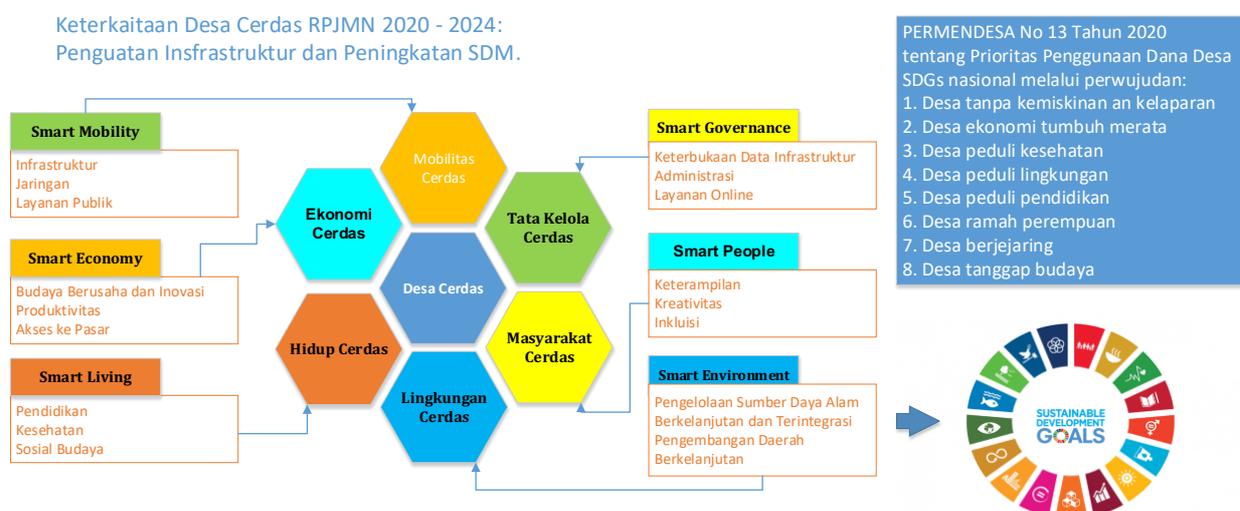
Penerapan konsep *Smart Village* melalui 6 pilar utamanya memiliki sinergi yang kuat dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa. Integrasi kedua pendekatan ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembangunan desa berkelanjutan di era digital. Berikut adalah narasi yang menggambarkan bagaimana penerapan 6 pilar Smart Village berkontribusi pada pencapaian SDGs Desa:

1. *Smart People* dan SDGs Desa: Pilar Smart People fokus pada pengembangan kapasitas masyarakat desa, yang sejalan dengan SDGs Desa terkait pendidikan berkualitas dan pengurangan kesenjangan. Melalui pelatihan digital dan peningkatan literasi informasi, masyarakat desa dibekali keterampilan yang diperlukan untuk era digital. Ini mendukung pencapaian SDGs Desa dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas.
2. *Smart Living* dan SDGs Desa: Implementasi Smart Living berkontribusi pada SDGs Desa terkait kesehatan yang baik, air bersih, dan sanitasi. Pengembangan sistem kesehatan berbasis teknologi dan peningkatan kualitas hidup melalui rumah pintar mendukung tercapainya desa sehat dan sejahtera. Ini juga sejalan dengan upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
3. *Smart Environment* dan SDGs Desa: Pilar ini sangat relevan dengan SDGs Desa terkait energi bersih, penanganan perubahan iklim, dan ekosistem daratan. Penerapan teknologi ramah lingkungan, sistem pengelolaan sampah terpadu, dan penggunaan energi terbarukan mendukung terciptanya desa yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim. Ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs Desa dalam aspek lingkungan.
4. *Smart Governance* dan SDGs Desa: Smart Governance mendukung SDGs Desa terkait kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Digitalisasi layanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui platform digital mendorong terciptanya tata kelola desa yang lebih baik. Ini sejalan dengan upaya mewujudkan SDGs Desa dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
5. *Smart Mobility* dan SDGs Desa: Pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi cerdas berkontribusi pada SDGs Desa terkait infrastruktur desa yang

memadai. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas mendukung pertumbuhan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan dengan daerah perkotaan. Ini sejalan dengan upaya pencapaian SDGs Desa dalam hal pemerataan pembangunan.

6. *Smart Economy* dan SDGs Desa: Pilar ini sangat relevan dengan SDGs Desa terkait pertumbuhan ekonomi desa dan inovasi. Pemberdayaan UMKM lokal melalui e-commerce dan pengembangan desa wisata digital mendukung terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs Desa dalam aspek ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Integrasi 6 pilar Smart Village dengan SDGs Desa menciptakan pendekatan yang holistik dalam pembangunan desa. Penerapan teknologi dan inovasi tidak hanya memodernisasi desa, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan ini, desa-desa di Indonesia dapat bertransformasi menjadi *Smart Village* yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga berkelanjutan, tangguh, dan sejahtera. Implementasi ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Dengan menyelaraskan penerapan *Smart Village* dan pencapaian SDGs Desa, diharapkan dapat tercipta model pembangunan desa yang inovatif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan global sambil tetap mempertahankan kearifan lokal. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terwujudnya desa-desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.



Gambar 2. Integrasi 6 pilar Smart Village dengan SDGs Desa

2. 3. Prinsip Pelaksanaan PKM Smart Village

Pelaksanaan PkM Smart Village dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. **Prinsip kolaborasi.** Melalui kolaborasi dengan rekan mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi lain memungkinkan para dosen dan mahasiswa berbagi ide, solusi, pengetahuan, dan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan solusi yang dikembangkan bersifat holistik dan inklusif.
2. **Prinsip pemberdayaan.** Melalui prinsip ini, dosen dan mahasiswa dapat berkontribusi mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan serta pembangunan 6 pilar desa cerdas. Melalui prinsip ini LLDikti wilayah 3 juga memastikan program-program yang dikembangkan tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk mandiri dan berkelanjutan.
3. **Prinsip Etika dan Tanggung Jawab.** Melalui prinsip ini setiap aktivitas dosen dan mahasiswa di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, menghormati budaya lokal, dan bertanggung jawab atas pertimbangan dampak jangka panjang dari intervensi yang dilakukan.
4. **Prinsip inklusivitas.** Prinsip ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat desa, termasuk kelompok rentan dan marjinal, dapat berpartisipasi dan menikmati manfaat dari pengembangan desa cerdas (Widodo et al., 2023).
5. **Prinsip Keberlanjutan.** Melalui prinsip ini diharapkan Perguruan Tinggi, LLDikti Wilayah III, Pemerintah Daerah secara bersama-sama berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, aman, harmonis dan memastikan pengembangan solusi yang berkelanjutan dari segi lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Melalui penerapan prinsip-prinsip di atas, LLDikti Wilayah 3 tidak hanya memfasilitasi PkM Merdeka Desa Cerdas , tetapi juga memastikan bahwa upaya-upaya tersebut membawa dampak positif jangka panjang bagi masyarakat desa. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, LLDikti Wilayah 3 hadir untuk dapat memberikan

kontribusi konstruktif dan signifikan dalam mewujudkan visi desa cerdas yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memperkuat fondasi sosial, ekonomi, lingkungan masyarakat desa

2.4. Sasaran

Sasaran pada kegiatan PkM Smart Village mahasiswa, selain menjangkau entitas mahasiswa tetapi entitas strategis lainnya dengan target sasaran sebagai berikut :

1. Mahasiswa

- a. Program PkM dirancang sebagai wadah transformatif bagi mahasiswa untuk memperluas cakrawala pemikiran dan pengalaman mereka. Melalui keterlibatan langsung dalam proyek-proyek pembangunan desa, mahasiswa diajak untuk keluar dari zona nyaman akademisnya dan menghadapi realitas kompleks di lapangan. Dalam proses ini, mahasiswa akan belajar untuk berpikir dan bekerja melampaui batas-batas disiplin ilmu mereka, menggali potensi kolaborasi lintas sektor yang sering kali menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat yang multifaset. Mereka akan merasakan langsung bagaimana pengetahuan teoretis yang diperoleh di bangku kuliah dapat diterjemahkan menjadi solusi praktis bagi tantangan nyata yang dihadapi masyarakat desa. Lebih dari sekadar menerapkan ilmu, program ini mendorong mahasiswa untuk menjadi jembatan antara dunia akademis dan realitas pembangunan di lapangan. Mereka akan belajar mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dan inovasi pendidikan ke dalam konteks pembangunan desa, menciptakan sinergi antara kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat grassroots. Melalui interaksi intensif dengan masyarakat desa, mahasiswa akan memperoleh pemahaman mendalam tentang kompleksitas tantangan pembangunan. Mahasiswa akan menyaksikan langsung bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan saling terkait dalam membentuk dinamika pembangunan desa. Pengalaman ini akan mempertajam kepekaannya terhadap nuansa-nuansa halus dalam konteks lokal yang sering kali luput dari pembahasan teoretis di kelas. Proses ini tidak hanya memperkaya pengalaman, tetapi juga mendorong fleksibilitas berpikir dan kreativitas dalam mencari solusi.

- 
- b. Program PkM dirancang sebagai wadah pengembangan pendekatan holistik dan multidisiplin. Dalam konteks PkM Smart Village, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengembangkan kompetensi akademis dalam dimensi keilmuannya masing-masing tetapi dihadapkan pada pengembangan kemampuan untuk dapat berpikir, bertindak dan memecahkan masalah secara lebih holistik dan multidisiplin. Pendekatan ini akan menempa mahasiswa memiliki karakter, kepekaan sosial, dan keterampilan kepemimpinan yang esensial untuk menjadi agen perubahan yang efektif di masyarakat. Mereka akan kembali ke kampus dengan perspektif yang lebih luas, holistik dan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan pembangunan, dan komitmen yang lebih kuat untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat.
 - c. Program PkM dirancang sebagai wadah pendewasaan pola pikir mahasiswa dalam menganalisis setiap permasalahan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah, serta mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis Ilmiah dan beretika.
 - d. Program PkM dirancang sebagai wadah untuk membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian terhadap lingkungan sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat khususnya di kawasan perdesaan.
 - e. Program PkM dirancang sebagai wadah untuk memberikan keterampilan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan program- program pengembangan dan pembangunan desa.
 - f. Membentuk sikap dan rasa empati, peduli sosial dan tanggung jawab mahasiswa terhadap permasalahan yang ada di negara dan masyarakat dalam multi level : desa, regional, nasional dan global
 - g. Membina dan menjadikan mahasiswa menjadi seorang *motivator*, *innovator* dan *problem solver* berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan keilmuan mahasiswa.
 - h. Memberikan pengalaman dan keterampilan bagi mahasiswa sebagai kader perubahan dan pembangunan.

2. Dosen

- a. Pengembangan yaitu memberikan peluang kepada dosen untuk melakukan riset berbasis teknologi di lingkungan desa sekaligus menguji teori dan konsep akademis dalam konteks nyata
- b. Peningkatan Kualitas Pengajaran yaitu dengan memperkaya materi pengajaran dengan studi kasus dan pengalaman lapangan sekaligus mengintegrasikan pengetahuan praktis ke dalam kurikulum pembelajaran
- c. Kontribusi Sosial yaitu dengan menerapkan keahlian akademis untuk memecahkan masalah nyata di masyarakat sekaligus berperan aktif dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan
- d. Kolaborasi Multidisiplin yaitu dengan memfasilitasi kerjasama antar fakultas dan program studi yang berbeda sekaligus mengembangkan pendekatan holistik dalam pemecahan masalah
- e. Pengembangan Jejaring yaitu dengan membangun kemitraan dengan pemerintah desa, LSM, dan sektor swasta sekaligus memperluas jaringan profesional dan akademis
- f. Publikasi Ilmiah yaitu dengan menghasilkan data dan temuan untuk publikasi jurnal ilmiah sekaligus berkontribusi pada literatur tentang pembangunan desa dan teknologi tepat guna
- g. Pengembangan Kompetensi yaitu dengan meningkatkan keterampilan dalam penerapan teknologi di lingkungan pedesaan sekaligus mengasah kemampuan manajemen proyek dan kepemimpinan
- h. Inovasi dan Transfer Teknologi yaitu dengan mengembangkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan desa sekaligus memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi ke masyarakat desa
- i. Akreditasi dan Penilaian Kinerja yaitu memenuhi komponen pengabdian masyarakat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus meningkatkan poin dalam penilaian kinerja dosen
- j. Pengembangan Kurikulum yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja terkait pembangunan desa sekaligus dapat merancang mata kuliah atau program studi baru berbasis pengalaman lapangan

- k. Pemberdayaan Mahasiswa yaitu dengan melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata, meningkatkan pengalaman praktis sekaligus menumbuhkan jiwa pengabdian dan kepedulian sosial pada mahasiswa
- l. Pendanaan dan Hibah yaitu dengan membuka peluang untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat sekaligus meningkatkan potensi kerjasama dengan lembaga donor atau industri
- m. Pengembangan Model Pembangunan yaitu dengan menciptakan model Smart Village yang dapat direplikasi di desa-desa lain sekaligus dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan pembangunan desa tingkat nasional
- n. Diseminasi Pengetahuan yaitu dengan menyebarkan pengetahuan dan praktik terbaik melalui seminar dan konferensi sekaligus dapat menulis buku atau modul pelatihan berbasis pengalaman PkM Smart Village
- o. Evaluasi Kebijakan yaitu dengan memberikan masukan berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan pembangunan desa sekaligus menganalisis efektivitas program pemerintah dalam konteks Smart Village

3. Masyarakat (Mitra dan Pemerintah)

- a. Memperoleh sumbangan bantuan pemikiran dan tenaga untuk merencanakan pengembangan masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada;
- c. Memperoleh pembaruan-pembaruan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan daerah yang lebih maju;
- d. Membentuk kader-kader pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

4. Perguruan Tinggi

- a. Perguruan Tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi, dengan adanya *feedback* karya dosen yang terdiseminasi melalui kegiatan PkM mahasiswa dengan lingkungan sosial di lokasi PkM. Hal ini akan berdampak kepada semakin adaptifnya proses pembelajaran

dan juga kurikulum perguruan tinggi disesuaikan dengan kondisi dan dinamika di masyarakat.

- b. Perguruan Tinggi dapat menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah atau lembaga lainnya dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- c. Perguruan Tinggi dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mengelola serta berkontribusi positif signifikan pada berbagai masalah di masyarakat.

5. Swasta

Kegiatan PkM Smart Village juga sangat strategis bagi pihak swasta/*corporate* karena keterlibatan di dalamnya menjadi wujud keterlibatan yang bersifat luas, bukan hanya tentang tanggung jawab sosial (CSR), tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata dengan memberikan manfaat bisnis bagi perusahaan swasta. Beberapa bentuk kontribusi dialektik yang dapat dikembangkan melalui PkM Smart Village adalah:

- a. Peluang pengembangan pasar baru di daerah pedesaan
- b. Peningkatan citra perusahaan melalui keterlibatan dalam pembangunan desa
- c. Kesempatan untuk inovasi produk dan layanan berbasis kebutuhan nyata
- d. Akses ke data dan wawasan pasar yang berharga

2. 5. Kompetensi yang dibutuhkan Mahasiswa PKM

Kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa dalam kegiatan PKM, yaitu:

1. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dan baik.
2. Mahasiswa mampu mengumpulkan data dan informasi lapangan.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di lapang.
4. Mahasiswa mampu merancang program pemberdayaan dalam smart village.
5. Mahasiswa mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat, lembaga pemerintah desa dan/atau swasta (*corporate*)
6. Mahasiswa mampu menggalang dan sinergi potensi yang ada di desa lokasi PkM.
7. Mahasiswa mampu menerapkan bidang ilmu yang telah dipelajari untuk berkontribusi pada pemecahan masalah.

- 
8. Mahasiswa mampu bekerja berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan bidang keilmuan.
 9. Mahasiswa mampu menggali kearifan lokal dan memotivasi masyarakat.
 10. Mahasiswa mampu beretika baik dan tanggung jawab, meningkatkan rasa solidaritas, disiplin dan efisien waktu.
 11. Mahasiswa mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mengevaluasi kinerja kelompok.
- 

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Lokasi dan Peserta Kegiatan

Kegiatan PkM Smart Village akan dilaksanakan di wilayah administratif Kabupaten Cianjur pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025. Kegiatan akan dilakukan dengan sejumlah koefisien waktu yang dapat dikonversikan menjadi minimal 10 SKS. Namun masing-masing universitas dapat mengembangkannya menjadi lebih dari minimum SKS yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan universitas masing-masing

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Smart Village yang akan dilaksanakan merupakan inisiatif kolaboratif yang komprehensif, dirancang untuk memberikan dampak maksimal bagi masyarakat desa. Pendekatan ini menggabungkan kekuatan dari berbagai pihak, institusi pendidikan, dan bidang keilmuan untuk menciptakan ekosistem pembangunan desa yang holistik dan berkelanjutan.

3.2. Kolaborasi Multi Pihak:

PkM Smart Village akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal. Pemerintah desa dan daerah akan berperan dalam menyediakan dukungan kebijakan dan infrastruktur dasar. Sektor swasta akan berkontribusi dalam pengembangan solusi teknologi dan pemberdayaan ekonomi. LSM akan membantu dalam mobilisasi masyarakat dan penguatan kapasitas lokal. Sementara itu, komunitas lokal akan menjadi mitra aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program.

3.3. Kerjasama Multi Universitas:

Program ini juga akan menggabungkan keahlian dan sumber daya dari beberapa universitas terkemuka. Setiap universitas akan membawa keunggulan spesifiknya masing-masing, baik dalam hal teknologi, ilmu sosial, ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Misalnya, satu universitas mungkin memiliki keahlian dalam sistem informasi geografis untuk pemetaan aset desa, sementara yang lain unggul dalam pengembangan aplikasi mobile untuk layanan publik. Kolaborasi ini akan menciptakan sinergi yang kuat, yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan *best practices* antar institusi akademik.

3.4. Pendekatan Multi Disiplin:

PkM *Smart Village* akan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Tim multi disiplin akan terdiri dari ahli teknologi informasi, insinyur lingkungan, ekonom, sosiolog, ahli kesehatan masyarakat, dan pakar pertanian. Misalnya, dalam pengembangan sistem pertanian cerdas, ahli IT akan bekerja sama dengan ahli pertanian untuk menciptakan aplikasi monitoring tanaman, sementara ekonom akan membantu dalam pengembangan model bisnis untuk petani lokal.

3.5. Multi Benefit bagi Masyarakat:

Melalui pendekatan multi pihak, multi universitas, dan multi disiplin ini, masyarakat desa diharapkan akan mendapatkan berbagai manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Solusi Terintegrasi: Masyarakat akan menerima solusi yang menyeluruh untuk berbagai aspek kehidupan desa, dari infrastruktur digital hingga pemberdayaan ekonomi.
2. Transfer Pengetahuan: Interaksi dengan berbagai ahli akan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang.
3. Inovasi Berkelanjutan: Kolaborasi multi pihak akan mendorong inovasi yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
4. Akses Luas: Masyarakat akan mendapatkan akses ke berbagai sumber daya dan jaringan yang lebih luas melalui mitra yang terlibat.
5. Pemberdayaan Holistik: Pendekatan multi disiplin akan memastikan pemberdayaan masyarakat dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan.
6. Keberlanjutan Program: Keterlibatan berbagai pihak akan meningkatkan peluang keberlanjutan program setelah masa PkM berakhir.
7. Peningkatan Kualitas Hidup: Integrasi berbagai solusi cerdas akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Implementasi PkM *Smart Village* dengan pendekatan kolaboratif ini diharapkan akan menciptakan model pembangunan desa yang inovatif, adaptif, dan

berkelanjutan. Melalui sinergi antara akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat, program ini diharapkan tidak hanya untuk mentransformasi desa menjadi *smart village*, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar mampu menghadapi tantangan di era digital dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Dengan demikian, PkM *Smart Village* menjadi katalis untuk menciptakan desa yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga tangguh, mandiri, dan sejahtera.

3.6. Kewajiban Mahasiswa

Dalam kegiatan PkM Smart Village ini, mahasiswa memiliki kewajiban, diantaranya:

1. Mahasiswa hadir di desa sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan PT Pengampu dan mendapatkan persetujuan dari Ketua Tim PkM.
2. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan atau menggunakan atribut universitas (almamater kampus) atau menggunakan identitas lain yang sesuai dengan ketentuan universitas/LLDikti Wilayah III
3. Mahasiswa wajib memakai name tag sesuai dengan ketentuan.
4. Mahasiswa wajib berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan PkM di desa.
5. Mahasiswa tidak menggunakan aksesoris berlebihan.
6. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa kendaraan pribadi roda empat.
7. Mahasiswa wajib mengikuti aturan (norma, adat istiadat, nilai, dll) desa lokasi PkM.
8. Mahasiswa wajib mandiri dan mempersiapkan keperluan pribadi secara detail .

3.7. Satuan Kredit Semester (SKS) dan Waktu Pelaksanaan

Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah satuan penghargaan terhadap waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran. Atau dengan kata lain sebagai besaran pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Penetapan SKS kegiatan pembelajaran mengacu pada ketentuan Permendikbud Ristek No 53 tahun 2023. Peraturan tersebut menjabarkan bahwa pentingnya pengintegrasian kegiatan PkM ke dalam kurikulum pendidikan tinggi dan memberikan kerangka untuk konversi kegiatan tersebut menjadi SKS. Peraturan tersebut menjadi

dasar hukum yang digunakan dalam buku panduan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Smart Village bagi mahasiswa ini. Termasuk pengaturan dalam rancangan waktu dan tahapan pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung selama 450 jam per semester untuk minimal 10 SKS (rekognisi) kegiatan PkM. Secara detail pengaturan ketentuan penggunaan 450 jam per semester, CPL, CPMK dan sub CPMK diatur dalam ketentuan rencana pembelajaran semester (RPS) yang khusus disusun untuk kegiatan smart village mahasiswa (dapat dilihat dalam lampiran)

Kegiatan PkM smart village mahasiswa disetarakan dengan mata kuliah yang mencakup penjelasan tentang pokok bahasan yang harus dikuasai dan dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen sebelum mengikuti kegiatan di lokasi PkM. Materi yang diberikan sesuai bidang keilmuannya masing-masing, yang akan diberikan pembekalannya oleh Tim (*Leader* dari Perguruan Tinggi yang sudah ditunjuk) meliputi bidang kompetensi program studinya dengan cakupan multidisiplin keilmuan yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai permasalahan masyarakat di lokasi PkM. Mahasiswa dan dosen harus mampu menyusun dan merealisasikan program multidisiplin dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan demikian mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) menggunakan data-data akurat di lapangan.

3.8. Target Luaran

Luaran program PKM diantaranya yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran, adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
- b. Artikel ilmiah siap submit (sesuai dengan template jurnal yang dituju)
- c. Video kegiatan dengan durasi 15 menit yang diunggah di media Youtube.

Seluruh luaran diserahkan harus dapat diselesaikan pada tanggal 28 Februari 2025

3.9. Sumber Pendanaan

PkM Merdeka Smart Village merupakan salah satu bentuk kemandirian MBKM, untuk itu pendanaan kegiatan berasal dari Perguruan Tinggi (PT) masing-masing atau kontribusi dari mahasiswa. Setiap PT memiliki fleksibilitas dalam menentukan sumber dana yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan ini. Beberapa opsi pendanaan dapat dipertimbangkan

dan dikembangkan oleh PT, dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan kebijakan keuangan institusinya masing-masing.

Peran LLDikti 3 dalam Pendanaan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (LLDikti Wilayah III) berperan dalam pendanaan aspek monitoring dan evaluasi (monev) secara keseluruhan. Pendanaan dari LLDikti Wilayah III difokuskan khususnya pada kegiatan terkait dengan: koordinasi dan pengawasan program lintas PT, pelaksanaan evaluasi program secara menyeluruh, penyediaan platform pelaporan dan dokumentasi program dan penyelenggaraan kegiatan diseminasi hasil program. Secara keseluruhan pendanaan dari LLDikti Wilayah III ini bertujuan untuk memastikan standarisasi dan kualitas pelaksanaan program PkM Merdeka Smart Village di seluruh PT yang berada di bawah koordinasinya.

Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring dan evaluasi (monev) internal dilaksanakan oleh masing-masing PT. Proses ini menjadi tanggung jawab penuh PT, termasuk dalam hal pembiayaannya. Aspek-aspek yang tercakup dalam monev internal meliputi: pemantauan progress kegiatan PkM Merdeka Smart Village, evaluasi pencapaian target dan indikator keberhasilan, penilaian kinerja tim mahasiswa dan dosen pembimbing, identifikasi tantangan dan solusi dalam pelaksanaan program dan penyusunan laporan internal untuk keperluan institusi masing-masing. Seluruh pembiayaan monev internal ini menjadi bagian dari komitmen PT dalam mendukung keberhasilan program PkM Merdeka Smart Village. PT dapat mengalokasikan dana khusus atau mengintegrasikannya ke dalam anggaran pengabdian masyarakat yang dimiliki masing-masing PT.

3.10. Pelaporan dan Transparansi

Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana bagi kepentingan internal perguruan tinggi, setiap PT diharapkan untuk:

1. Menyusun rencana anggaran detail untuk kegiatan PKM Smart Village khususnya untuk pembiayaan mahasiswa di lapangan dan dalam melaksanakan kegiatan PkM.
2. Melakukan pencatatan dan dokumentasi penggunaan dana secara rinci

- 
3. Menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing PT
 4. Melakukan audit internal terhadap penggunaan dana program secara mandiri

Transparansi dalam pengelolaan dana ini penting untuk membangun kepercayaan dan mendukung keberlanjutan program PkM Smart Village di masa mendatang.

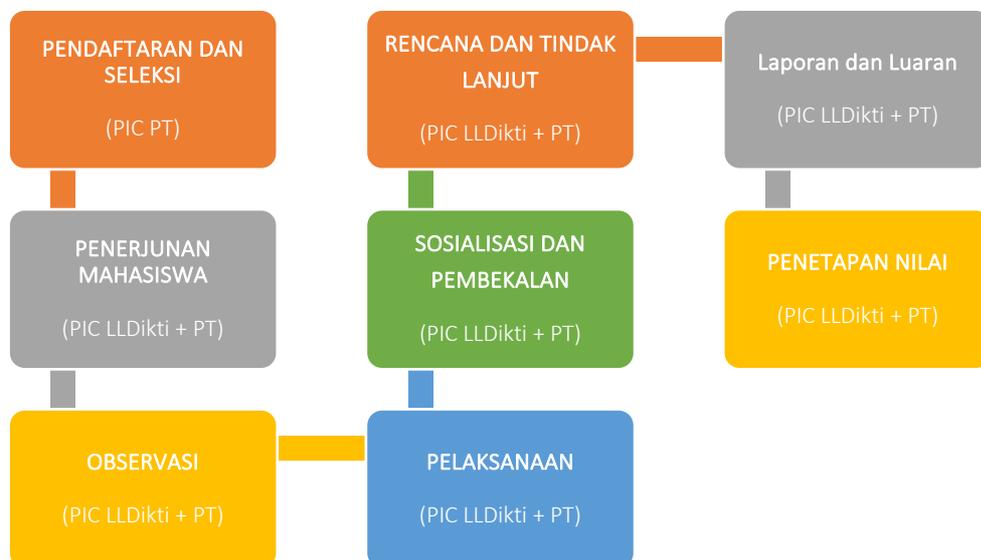


BAB IV PENGELOLAAN KEGIATAN PKM

4.1. Alur Kegiatan dan Struktur Organisasi PKM

Kegiatan kuliah kerja nyata (PkM) diselenggarakan bagi mahasiswa yang telah menempuh semester 4 (empat) yang dibimbing langsung oleh dosen pembimbing lapangan dari universitasnya dan berkoordinasi dengan koordinator desanya masing-masing desa. Pada program PkM ini, mahasiswa menjadi pusat kegiatan PkM dengan bertindak sebagai inisiator program, fasilitator maupun pelaksana kegiatan. Program PkM memiliki alur sebagai berikut :

Alur kegiatan PkM Smart Village Mahasiswa



4.2. Struktur Organisasi PkM Smart Village Mahasiswa

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), struktur organisasi memainkan peran yang sangat penting. Struktur yang dipilih berprinsip sederhana dan kolegial dalam memastikan program berjalan dengan lancar, tepat waktu, memenuhi target, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Kesederhanaan dalam struktur organisasi memungkinkan terciptanya efisiensi operasional yang tinggi, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Hal ini sangat krusial mengingat dinamika masyarakat yang seringkali berubah cepat dan membutuhkan respons yang cepat dari tim PkM.



Prinsip kolegial, dipilih dengan prinsip bahwa semua universitas yang tergabung dalam kegiatan PkM disini setara sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kolaboratif dan inklusif. Dalam struktur yang kolegial, setiap anggota tim merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara maksimal. Hal ini memicu kreativitas dan inovasi dalam merancang dan melaksanakan program PkM yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi lintas universitas, lintas disiplin yang terjadi dalam tim yang kolegial juga memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kombinasi antara kesederhanaan dan kolegialitas dalam struktur organisasi menciptakan fleksibilitas yang tinggi. Tim PkM dapat dengan cepat beradaptasi terhadap tantangan dan peluang baru yang muncul di lapangan. Pengambilan keputusan yang partisipatif, yang merupakan ciri khas struktur kolegial, memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan pengalaman. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan tetapi juga membangun rasa kepemilikan bersama terhadap program.

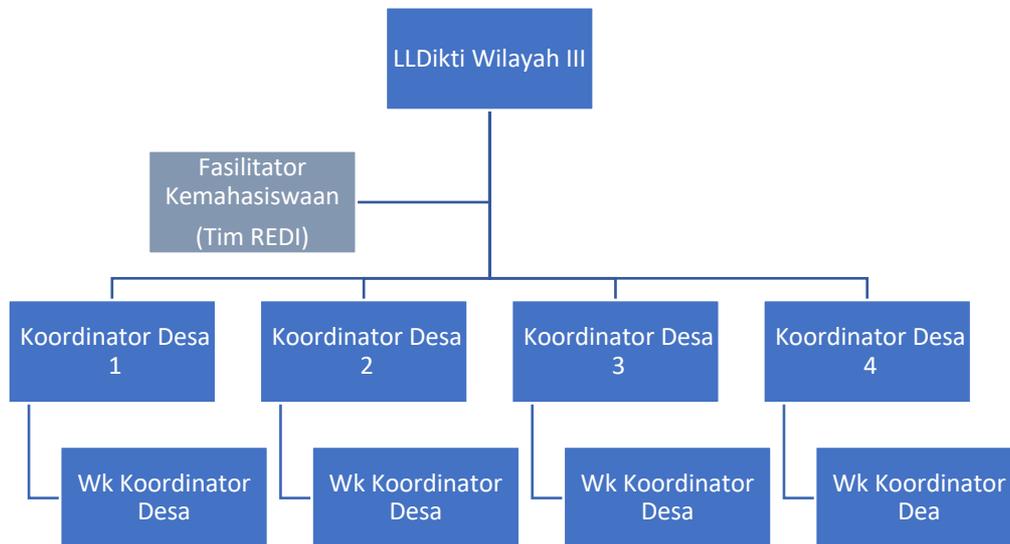
Ketika struktur organisasi berjalan dengan prinsip sederhana dan kolegial, koordinasi antar anggota tim menjadi lebih mudah dan efektif. Informasi mengalir dengan lancar, dan setiap anggota memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawabnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa program PkM berjalan sesuai jadwal dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Tidak ada waktu yang terbuang untuk navigasi birokrasi yang rumit atau menunggu keputusan dari hierarki yang panjang.

Lebih penting lagi, struktur yang sederhana dan kolegial memungkinkan tim PkM untuk tetap fokus pada tujuan utama: memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dengan mengurangi kompleksitas organisasi, lebih banyak energi dan sumber daya yang dapat dialokasikan langsung untuk kegiatan yang berdampak. Tim dapat lebih responsif terhadap umpan balik dari masyarakat dan dengan cepat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan dampak positif program. Dalam jangka panjang, pendekatan ini juga mendukung keberlanjutan program PkM. Struktur yang sederhana lebih mudah untuk direplikasi dan diadaptasi di berbagai konteks, sementara prinsip kolegial membangun kapasitas lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk program-program PkM yang tidak hanya sukses dalam jangka pendek tetapi juga memiliki dampak yang bertahan lama dan transformatif bagi masyarakat. Berdasarkan



penjelasan tersebut maka struktur organisasi dalam kegiatan PkM Mahasiswa Smart Village adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dalam Kegiatan Pkm Mahasiswa Smart Village



LLDikti Wilayah III

LLDikti Wilayah III memiliki peran yang sangat krusial sebagai penanggung jawab kegiatan PkM Smart Village secara keseluruhan dan sebagai mediator antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah setempat. Tanggung jawab ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari perencanaan strategis hingga evaluasi akhir program, dengan tujuan utama memastikan bahwa setiap kegiatan PkM memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan nasional khususnya SDG'S Desa.

Dalam kapasitasnya sebagai koordinator utama, LLDikti Wilayah III bertanggung jawab untuk menyusun dan mengkomunikasikan pedoman pelaksanaan PkM yang komprehensif kepada seluruh Perguruan Tinggi (PT) di bawah naungannya. Pedoman ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan teknis, tetapi juga menetapkan standar kualitas dan etika yang harus dipatuhi dalam setiap tahapan kegiatan. Melalui perannya ini, LLDikti Wilayah III memastikan adanya keseragaman dalam pemahaman dan implementasi program PkM, sambil tetap memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas masing-masing PT.



Lebih dari sekadar penyusunan pedoman, LLDikti Wilayah III juga berperan aktif dalam memfasilitasi kolaborasi antar PT dan dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini termasuk membangun jembatan antara dunia akademik dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dibantu oleh seluruh PT. Melalui upaya ini, LLDikti Wilayah III mendorong terciptanya sinergi yang memperkuat dampak dan keberlanjutan program PkM, memastikan bahwa setiap inisiatif tidak berdiri sendiri tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang lebih luas.

Dalam aspek pendanaan, meskipun sebagian besar pembiayaan kegiatan PkM berasal dari masing-masing PT dan/atau mahasiswa, LLDikti 3 memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya alokasi dan penggunaan dana untuk mendukung program ini dilaksanakan secara efektif dan transparan. Ini mencakup pengawasan terhadap proses penganggaran, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang direalisasikan dalam program PkM memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat.

Salah satu tanggung jawab kunci LLDikti Wilayah III adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan PkM. Proses monev ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan keuangan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan dampak nyata program terhadap masyarakat. Melalui mekanisme monev, LLDikti Wilayah III dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik untuk disebarluaskan, serta area-area yang memerlukan perbaikan atau dukungan tambahan.

LLDikti Wilayah III juga memiliki tanggung jawab penting dalam pengembangan kapasitas kemahasiswaan. Ini meliputi penyelenggaraan FGD, workshop, dan forum diskusi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi para pelaksana PkM dari berbagai PT. Melalui inisiatif ini, LLDikti Wilayah III memastikan bahwa setiap tim PkM dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif terkini yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan program yang inovatif dan berdampak tinggi.

Tak kalah pentingnya, LLDikti Wilayah III bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil dan pembelajaran dari setiap kegiatan PkM didokumentasikan dan disebarluaskan dengan baik. Ini termasuk memastikan seluruh luaran berupa laporan PkM, artikel ilmiah siap publish dan video kegiatan dalam selesai dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan visibilitas dan pengakuan terhadap kontribusi PT dalam



pembangunan masyarakat, tetapi juga mendorong terjadinya *cross-learning* dan replikasi program yang sukses.

Dengan mengemban tanggung jawab yang komprehensif ini, LLDikti Wilayah III tidak hanya berfungsi sebagai penanggung jawab, tetapi juga sebagai katalis yang mendorong transformasi positif melalui kegiatan PkM. Peran ini memastikan bahwa setiap upaya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PT di bawah koordinasinya tidak hanya memenuhi kewajiban akademis, tetapi benar-benar berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara berkelanjutan.

Fasilitator Kemahasiswaan PkM Smart Village

Dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Smart Village, Tim REDI LLDikti Wilayah III bertindak sebagai fasilitator kemahasiswaan. Tanggung jawab Tim REDI tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga melibatkan peran aktif dalam memastikan program pembelajaran di luar kampus melalui PkM berjalan dengan aman dan nyaman, serta membantu mengatasi hambatan-hambatan teknis dan operasional yang mungkin muncul selama pelaksanaan program.

Koordinasi yang efektif menjadi kunci dalam tanggung jawab Tim REDI. Mereka membangun dan memelihara jaringan komunikasi yang kuat antara LLDikti Wilayah III, Tim PkM, pemerintah daerah, dan masyarakat desa.

Dalam aspek pemantauan dan evaluasi, Tim REDI mengambil peran proaktif. Mereka tidak hanya mengumpulkan data dan laporan, tetapi juga melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dinamika program di setiap desa yang dialami oleh mahasiswa. Observasi langsung ini memungkinkan Tim REDI untuk membantu LLDikti Wilayah III mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi, serta area-area yang memerlukan dukungan atau intervensi tambahan. Hasil dari pemantauan ini kemudian diolah menjadi rekomendasi konkret untuk penyempurnaan program, yang disampaikan kepada LLDikti Wilayah III dan pihak-pihak terkait.

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan adalah dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan bimbingan, pendampingan, serta evaluasi mahasiswa peserta PKM. DPL berasal dari anggota



dosen yang berada dalam sebuah tim PkM. DPL berperan dalam memberikan bimbingan baik sebelum, selama dan sesudah kegiatan. Bimbingan mahasiswa oleh DPL masing-masing merupakan upaya untuk peningkatan kapasitas, pengetahuan dan skill mahasiswa terkait dengan kemungkinan permasalahan dan program yang akan dihadapi oleh mahasiswa selama PKM. Frekuensi bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan program.



BAB V : DESKRIPSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Koordinator Desa Program PkM Smart Village

Dalam lanskap program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Smart Village, koordinator desa memainkan peran yang sangat krusial sebagai perwakilan LLDikti Wilayah III di lokasi PkM. Tanggung jawab utama mereka memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa berjalan sesuai rencana, menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bebas dari potensi konflik, inovatif dalam pendekatannya, serta memiliki prospek keberlanjutan jangka panjang.

Koordinator desa juga memiliki tanggung jawab untuk membangun dan memperkuat jaringan kerjasama lokal. Ini melibatkan identifikasi dan mobilisasi sumber daya lokal, baik itu keterampilan, pengetahuan tradisional, maupun aset fisik yang dapat mendukung program. Mereka juga berperan dalam memfasilitasi kemitraan dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, atau organisasi masyarakat sipil lainnya, yang dapat memberikan dukungan tambahan bagi keberhasilan dan keberlanjutan program. Dengan mengemban tanggung jawab yang kompleks dan multifaset ini, koordinator desa program PKM Smart Village tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong transformasi berkelanjutan di tingkat desa. Melalui dedikasi, keterampilan, dan kepekaan mereka terhadap konteks lokal, koordinator desa memegang kunci untuk mengubah visi Smart Village menjadi realitas yang membawa manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Wakil Koordinator Desa

Wakil koordinator desa bertanggung jawab untuk membantu tanggung jawab dari koordinator desa. Wakil koordinator desa dipilih dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dengan latar belakang multidisiplin. Tugas pokoknya wakil koordinator desa adalah untuk memastikan kegiatan berjalan, menjadi jembatan komunikasi dengan koordinator desa dan turut memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan luaran dapat tercapai dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Wakil koordinator desa juga turut memastikan dinamika yang terjadi di lapangan dan memastikan bahwa pilihan-pihak kegiatan dapat memberikan

dampak positif untuk masyarakat. Seluruh kegiatan wakil koordinator desa dilakukan dengan koordinasi intensif dengan koordinator desa

Deskripsi Tugas Peserta PKM

Berikut ini adalah tugas peserta PKM:

1. Setiap desa harus memilih mahasiswa sebagai wakil koordinator desa yang berkoordinasi dengan Koordinator Desa (Tim REDI) dan mengkoordinir seluruh kegiatan di tingkat desa.
2. Kordes yang terpilih bertanggung jawab terhadap program kegiatan dan anggota kelompok selama pelaksanaan PkM.
3. Setiap kelompok wajib melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan program kegiatan PKM.
4. Setiap kelompok wajib membuat Program Kerja dan Jadwal Kegiatan yang akan dikoordinasikan dengan koordinator desa dan dosen pembimbing lapangan yang berasal dari universitasnya masing-masing
5. Setiap kelompok wajib melaksanakan seluruh kegiatan dengan protokol Kesehatan ketat untuk menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain utamanya masyarakat sekitar.
6. Setiap kelompok diwajibkan membuat luaran akhir berupa laporan PkM , artikel ilmiah siap submit dan video kegiatan.
7. Setiap kelompok diwajibkan membuat dan menyerahkan laporan akhir PKM dengan waktu yang telah ditentukan .

BAB VI

EVALUASI DAN SANKSI

6. 1. Prosedur Monitoring dan Evaluasi

Prosedur monitoring dan evaluasi pada PKM ini meliputi:

1. Koordinator desa melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan PkM secara luring maupun daring di lokasi PkM minimal 1 kali selama pelaksanaan kegiatan.
2. Koordinator Desa dan DPL akan melakukan *monitoring* lapangan pada minggu ke-2 atau ke-3 untuk melihat pelaksanaan program kegiatan.
3. DPL membawa dan mengisi form indikator monitoring DPL saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk masing-masing desa
4. DPL mengupload dokumen lembar hasil *monitoring* dan dokumentasi *monitoring* ke dalam *google drive* yang disediakan sesuai masing-masing desa.
5. Mahasiswa diwajibkan mengisi *logbook* (daftar kegiatan harian) dan DPL melakukan verifikasi tentang kegiatan yang dilakukan dan dimasukkan ke dalam *google drive* setiap minggu sesuai masing-masing desa.
6. Di samping pemantauan melalui *logbook* kegiatan, mahasiswa juga melaporkan secara virtual seperti rekaman video/foto dll kegiatan kepada koordinator desa dan DPL sebagai dokumentasi kelompok dan juga individu.
7. Peserta PkM wajib konsultasi/melaporkan kegiatan PKM kepada DPL minimal 1 kali dalam 1 minggu melalui aplikasi atau media lain yang sudah dikonfirmasi kepada DPL.
8. Laporan dan luaran kegiatan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 minggu setelah kegiatan PKM, kemudian dikonsultasikan kepada koordinator desa dan DPL dan dilanjutkan pada pendaftaran seminar akhir PKM.
9. Mahasiswa melakukan proses pendaftaran ujian akhir mengikuti pelaksanaan kegiatan PKM dengan melampirkan laporan kegiatan dan luaran kegiatan yang berisi *logbook*, laporan akhir kelompok, laporan akhir individu, video kegiatan.
10. DPL mengisi form penilaian akhir kegiatan kepada masing-masing mahasiswa (Lampiran Form Evaluasi/Penilaian Akhir).

11. Bagian tim Monev PT dapat melakukan rekap penilaian tengah kegiatan dari monitoring dan evaluasi kegiatan PKM, dengan prosentase nilai DPL sebesar 100%.
12. Bagian akademik PT dapat melakukan rekapitulasi penilaian ujian akhir kegiatan masing-masing mahasiswa peserta PkM sesuai dengan forum penilaian yang dimuat dalam RPS (lampiran)
13. Penilaian hasil konversi menjadi tanggung jawab dari PT masing-masing sesuai dengan penilaian prodi atau fakultasnya masing-masing.

6. 2. Penyerahan Laporan PKM

Berikut ini ketentuan Penyerahan Laporan PkM

1. Penyerahan laporan PkM dari *hard print* sesuai *template*, dan *soft file* yang dilengkapi dengan dokumentasi dan video kegiatan PKM.
2. Tautan penyerahan Laporan PkM akan disiapkan oleh LLDikti Wilayah III untuk keperluan laporan program PkM Merdeka Smart Village.
3. Catatan :
 - Laporan *soft file* dikumpulkan dalam format word dan PDF disimpan pada folder yang berbeda
 - Video diberi nama file : *PKM 2024_Kelompok_Desa...._Kecamatan....*
4. Penyerahan Laporan PkM untuk keperluan internal perguruan tinggi diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi.

6. 3. Evaluasi Kegiatan PKM

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan nilai prestasi akademik kepada mahasiswa sekaligus sebagai gambaran keberhasilan PKM oleh mahasiswa. Tugas terakhir dari DPL adalah melaksanakan evaluasi dan memberikan nilai terhadap mahasiswa peserta PKM. Oleh karena itu, proses penilaian harus sudah dimulai sejak dilakukannya pembekalan sampai dengan penyerahan laporan. Panduan yang dipakai untuk memberikan penilaian terakhir kepada mahasiswa peserta PKM meliputi lima komponen, yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan: pembekalan berdasarkan kehadiran mahasiswa dalam acara pembekalan dan koordinasi dengan DPL.

2. Perencanaan kerja: diperoleh dari nilai hasil pendalaman dan rencana kerja program PKM (Relevansi program kegiatan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat)
3. Pelaksanaan kerja: diperoleh berdasarkan indikator keterlaksanaan program kerja yang telah disusun sebelumnya dan keberadaan mahasiswa di lokasi PKM.
4. Kemampuan interpersonal: berdasarkan indikator kerja sama, kejujuran, kedisiplinan kreativitas, tanggung jawab, dan sopan santun selama melaksanakan program PKM.
5. Laporan diperoleh dari nilai laporan akhir kegiatan PKM (Penilaian laporan PKM terdiri atas penilaian kelompok dan individu, Kesesuaian format dan sistematika laporan PKM, Kedalaman pembahasan dan ketajaman analisis laporan PKM).
6. Kemampuan dalam tes wawancara secara individu yang diselenggarakan setelah kegiatan lapangan PKM.

6. 4. Sanksi

Mahasiswa peserta kegiatan PkM dinyatakan gugur, jika:

1. Tidak hadir selama kegiatan PKM (kehadiran < 80%)
2. Melakukan pelanggaran berat (dari hasil diskusi DPL dan Fasilitator Kemahasiswaan LLDikti Wilayah III) saat kegiatan lapangan. Pelanggaran berat seperti : Pelanggaran Asusila, Perundungan, Kekerasan Fisik, Judi, Penyalahgunaan NAPZA, Minuman Keras, dan hal-hal yang melanggar hukum serta adat istiadat setempat.

Penilaian hasil kegiatan dilakukan secara integratif dari kedua komponen kegiatan, yaitu pelaksanaan ujian (*assesment*) yang dilakukan secara lisan dengan metode luring. Persyaratan bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti PKM adalah sebagai berikut:

1. Peserta adalah mahasiswa aktif.
2. Diprioritaskan bagi mahasiswa yang semester berikutnya akan melakukan Tugas Akhir, atau mahasiswa yang sedang diproyeksikan mengikuti program pendanaan kemahasiswaan pada tahun berikutnya.

3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat di pedesaan.
5. Mahasiswa berkelompok dalam kluster yang sudah disusun di bawah bimbingan dosen yang telah ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi
6. Waktu pelaksanaan PKM setelah kegiatan perkuliahan semester Genap berakhir.
7. Calon peserta PkM wajib mengisi data melalui tautan yang telah disediakan Pendaftaran PKM.
8. Kriteria penilaian mahasiswa PkM, adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasar pada kehadiran di lokasi kegiatan, apabila presensi < 80% tidak lulus.
 - b. Mengisi *logbook* kegiatan secara individu dan konsultasi setiap minggu kepada Dosen Pembimbing.
 - c. Mengumpulkan target luaran yang telah ditetapkan

6. 5. Ketentuan Khusus

Bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian di luar skema ini, maka kegiatan tersebut dapat di rekognisi sebagai PkM apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Harus memiliki izin/rekomendasi dari pimpinan universitas;
2. Pengajuan dilakukan sebelum pelaksanaan PkM;
3. Terdapat dosen pembimbing yang menjamin pelaksanaan pengabdian mahasiswa tersebut sesuai dengan standar PkM;
4. Surat untuk mahasiswa dan surat tugas dosen pembimbing lapangan dikeluarkan oleh masing-masing perguruan tinggi

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

Cover

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN (2 - 3 Halaman)

- 1.1 Latar Belakang (uraian lokasi, permasalahan dan tantangan di desa, solusi singkat)
- 1.2 Tujuan Kegiatan (Tujuan spesifik kegiatan yg diprogramkan)
- 1.3 Manfaat Kegiatan
- 1.4 Luaran yang Diharapkan

BAB II PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI DIUSULKAN (5-8 hlm)

- 2.1 Analisis Situasi dan Potensi Desa
- 2.2 Identifikasi Permasalahan
- 2.3 Alternatif Solusi Permasalahan

BAB III PROGRAM KERJA DAN TIME LINE KEGIATAN (6-10 hlm)

- 3.1 Program Kerja
- 3.2 Time Line Kegiatan

BAB IV PEMBAHASAN (15 – 20 hlm)

- 4.1 Implementasi dan Capaian Program
(Deskripsi yang luas dan mendalam selama waktu berjalannya kegiatan di lapangan perihal pelaksanaan program utama)
- 4.2 Monitoring Dan Evaluasi
(Pembahasan keberhasilan program. Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam kegiatan)

BAB V PENUTUP (1-2 hlm)

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi Implementasi Capaian Program

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi Kegiatan

Lampiran 2. Peta Administrasi Desa

Lampiran 3. Foto Kegiatan/Dokumentasi

Lampiran 4. Surat-surat Pendukung

Lampiran 5. Bukti Luaran Kegiatan

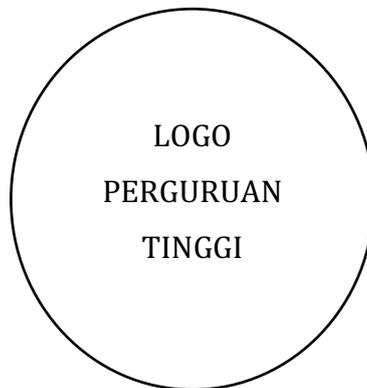
Penulisan Format Laporan Akhir:

- *Jenis font: Times new roman; ukuran: 12; spasi: 1.5; Ukuran kertas:A4; margin: Atas 2,5, kanan 2,5, dan bawah 2,5 cm; kiri 3 cm.*
- *Warna cover Kuning Kunyit*
- *Laporan diikonsultasikan dan di acc oleh DPL, sebelum dikumpulkan.*

Lampiran 2. Format Cover

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode Semester Genap 2024/2025**

**DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN.....
JUDUL/TEMA (Disesuaikan tema program kerja kelompok)**



**Koordinator Desa
Dosen Pembimbing Lapang
Nama Dosen (NIP/NIK)
Disusun Oleh:
Nama (NIM)**

**PROGRAM STUDI.....
UNIVERSITAS.....
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Lampiran 3. Format Lembar Pengesahan Laporan PkM

LEMBAR PENGESAHAN

Kegiatan

Judul :

Lokasi

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

Pelaksanaan Kegiatan

1. Koordinator Desa :

2. Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
dst

Waktu Pelaksanaan :

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapang

Koordinator Desa

Nama
NIP/NIK.

Nama
NIM

Pj L2Dikti 3

Mengetahui,

Kepala Desa

Nama
NIP/NIK

Nama
NIP/NIK

Lampiran 4. Format Luaran Video Kegiatan PKM

Format Video

Beberapa ketentuan Video kegiatan PKM adalah sebagai berikut:

1. Berdurasi 15 menit
2. Format file video MP4 dan posisi landscape
3. Mencantumkan Logo Perguruan Tinggi dan Logo Kampus Merdeka selama video berlangsung
4. Mencantumkan Nama Mahasiswa, Foto kelompok dan Lokasi Desa
5. Suara bisa langsung atau tidak langsung (diisi)
6. Menggunakan subtitle dalam bahasa Inggris
7. Urutan Narasi Video Kegiatan;
 - a. Narasi pembuka
 - b. Lokasi PKM
 - c. Pelaksanaan dilakukan terkait substansi: Potensi dan permasalahan Desa; Kegiatan tema dilakukan (program kerja setiap kegiatan selama PKM)
 - d. Kesimpulan
 - e. Narasi penutup (Ketua dan Anggota)
8. Video diunggah di youtube.

Adapun format tampilan video kegiatan sebagai berikut:





Lampiran 6. Format Artikel Ilmiah

Artikel Media Massa Online sekurang-kurangnya berisi sebagaimana format di bawah ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. **Adapun posisi masing-masing isi dan desain tergantung kreativitas peserta dan disesuaikan template jurnal yang dituju.**



Lampiran 7. Format Log Book Kegiatan PKM

Ketentuan Log Book

Log book dibuat untuk masing-masing mahasiswa (individu)

Log book dibuat per hari

Log book di tulis tangan dengan tinta warna hitam.

Log book dicetak di kertas A4 70 gram

Log book di ttd DPL setiap Minggu sekali

LOG BOOK PKM (LAPORAN KEGIATAN HARIAN)

PERGURUAN TINGGI

NAMA :

NIM :

PRODI :

DESA :

KECAMATAN :

KELOMPOK :

No.	Hari/Tgl	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	Foto/Dokumentasi

Kota, tanggal/bulan/tahun
Menyetujui
Dosen Pembimbing Lapangan

Nama NIP/NIK

Lampiran 8. Format Indikator Monitoring DPL

FORMAT INDIKATOR MONITORING DPL

No.	Indikator Monitoring	Deskripsi Hasil Monitoring
1	Kejelasan program dan rencana kerja	
2	Pengembangan <i>teamwork</i>	
3	<i>Leadership development</i> dalam kelompok	
4	Kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi internal kelompok	
5	Kemampuan berkolaborasi dengan pihak desa	
6	Kemampuan berkolaborasi dengan pihak eksternal lainnya	
7	Keterlibatan para pihak dan kinerja program dijalankan	
8	Tingkat sasaran program pada Aspek SDGs	

Lampiran 10. Form Rekognisi dan Konversi

REKOGNISI DAN KONVERSI MBKM

KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN

PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA: **NON PERTUKARAN PELAJAR - MAGANG**

NIM	Nama Mahasiswa	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Program Studi	Semester
Nama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Fakultas/Prodi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, email, no.telp)	
				Koordinator PT Program	
Lembaga/Lokasi Tujuan	Departemen/bidang kerja	Alamat		Penanggung jawab (Nama, email, no.telp)	
Jenis Aktivitas	Bagian Penempatan	Deskripsi Pekerjaan		Tim Pelaksana	
No. Surat Tugas kegiatan mahasiswa	No. surat tugas DPL				

RENCANA PEMBELAJARAN DI MITRA

MAGANG/KAMPUS MENGAJAR/KKNT/PENELITIAN/KEWIRAUSAHAAN/PROYEK KEMANUSIAAN/DLL

Tabel 1. Rencana Durasi Kegiatan Merdeka Belajar: dari.....(bulan/tahun) sampai.....(bulan/tahun)

No	Rencana Kegiatan Merdeka Belajar	Kompetensi yang diperoleh dari kegiatan Merdeka Belajar	Jumlah Durasi Kegiatan (menit)

Total Kredit
<ul style="list-style-type: none"> • Harap berikan dokumen lampiran kegiatan di mitra yang menjelaskan tugas, tanggungjawab dan kompetensi yang diperoleh mahasiswa (learning outcomes) • 1 SKS = 170 menit × 16 minggu/semester = 2.720 menit/semester. Kegiatan yang berbobot 20 sks setara dengan 54.400 menit atau 906,67 jam.

RENCANA PENGAKUAN KREDIT PEMBELAJARAN

Tabel 2. Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran di Universitas Nasional

Kode dan Nama mata kuliah	Semester	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPL)	SKS Mata Kuliah
Total Kredit			
<ul style="list-style-type: none"> • Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di Universitas Nasional yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (course learning outcomes)-sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. • Ketentuan yang berlaku, jika mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan kegiatan magang/praktik kerja, mahasiswa menerima konsekuensinya 			

KOMITMEN

Dengan menandatangani dokumen ini, Mahasiswa (nama Perguruan Tinggi) dan Lembaga Tujuan Program PKM **tuliskan jenis aktivitasnya sesuai di halaman sebelumnya** menyatakan bahwa semua pihak menyetujui kesepakatan perolehan kredit pembelajaran ini dan bahwa semua pihak akan mematuhi ketentuan yang disepakati di dalam dokumen kesepakatan ini. Lembaga tujuan program PKM menyatakan bahwa semua kegiatan yang disebutkan di tabel 1 adalah dengan persetujuan lembaga dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa, (nama Perguruan Tinggi) berkomitmen untuk melakukan pengakuan kredit pembelajaran (SKS) yang diperoleh mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan kegiatan PKM dan mengakuinya dalam perhitungan sks mahasiswa (credit earning) sebagaimana

disebutkan di tabel 2. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kesepakatan ini akan dituliskan dalam dokumen tambahan terhadap kesepakatan perolehan kredit pembelajaran ini dan disetujui oleh semua pihak. Mahasiswa dan lembaga tujuan akan berkomunikasi kepada (nama Perguruan Tinggi)nal jika terdapat permasalahan atau perubahan kegiatan, jadwal dan durasi kegiatan, dan /atau perubahan penanggungjawab kegiatan.

Kemitraan	Nama	Email	Posisi	Tanggal	Tandatangan
Mahasiswa					
Penanggung jawab di Perguruan Tinggi			Koordinator PT		
Penanggung jawab di Lembaga					

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Nama, Gelar
NIDN:

Lampiran 11. Form Rekognisi dan Konversi

(KOP SURAT)

LEMBAR KONVERSI SKS PROGRAM PKM

Nama Mahasiswa :
NPM :
Program Studi :
Fakultas :
Program PKM :
Periode Kegiatan :
Mitra Kegiatan :
Posisi Pekerjaan :
Ketua Program Studi :
Koordinator :
Perguruan Tinggi

Penilaian Dari Mitra:

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	JUMLAH	

Konversi Mata Kuliah:

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	NILAI	HURUF
1					
2					
3					
4					

5					
6					
		JUMLAH			

Jakarta, dd/mm/yyyy

Mengetahui,
 Koordinator Perguruan Tinggi

Menyetujui,
 Ketua Program Studi

(.....)

(.....)

*) Lampiran: Laporan Kegiatan